



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.142, 2012

PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-
Persatuan Emirat Arab. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB
EMIRATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2010 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK,
DINAS DAN KHUSUS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Berhasrat untuk lebih mengembangkan hubungan bilateral dan kerjasama antara kedua negara,

Menyatakan kesiapannya untuk membebaskan warga negara dari kedua negara pemegang paspor-paspor diplomatik, dinas dan khusus dari visa masuk ketika memasuki wilayah masing-masing,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara,

Memperhatikan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Tahun 1963,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Persatuan Emirat Arab untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal masuk.
2. Warga Persatuan Emirat Arab, pemegang paspor diplomatik dan khusus yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit

dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal masuk.

3. Masa berlaku paspor diplomatik, dinas dan khusus dari warga negara masing-masing Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat memasuki wilayah Pihak lainnya.

Pasal 2

Warga Negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di wilayah negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya.

Pasal 3

1. Para Pihak wajib bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh dari paspor diplomatik, dinas dan khusus yang digunakan oleh masing-masing Pihak sebelum penandatanganan Persetujuan ini dan masing-masing Pihak wajib menyediakan kepada Pihak lainnya contoh setiap paspor baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penerbitan dimulai.
2. Kedua Pihak masing-masing wajib memberitahukan mengenai setiap perubahan yang diperkenalkan di dalam peraturan dan hukum nasional terkait dengan penerbitan paspor.

Pasal 4

Warga negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus, tidak diizinkan untuk bekerja atau turut serta dalam pekerjaan apapun atau untuk belajar di negara masing-masing tanpa menghormati peraturan yang berlaku di kedua negara terkait kegiatan-kegiatan tersebut diatas.

Pasal 5

1. Pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus yang sah dari masing-masing Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya dari setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor yang sah tersebut.
2. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara masing-masing Pihak dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya terkait masuk, tinggal dan keluarnya orang asing.

Pasal 6

1. Kedua Pihak memiliki hak untuk menolak masuknya atau memperpendek masa tinggal orang yang memiliki status persona non grata atau dianggap dapat membahayakan kedamaian umum, ketentraman umum, keteraturan umum, kesehatan umum, maupun keamanan nasional.
2. Dalam hal warga negara dari masing-masing Pihak kehilangan paspor sahnya sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 Persetujuan ini di wilayah salah satu Pihak, mereka wajib menginformasikan kepada pihak berwenang di wilayah negara Penerima. Misi diplomatik maupun Konsuler dimaksud wajib menerbitkan sebuah paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara dimaksud dan memberitahukannya kepada pihak berwenang Pihak Penerima.

Pasal 7

1. Para pihak menyatakan kesiapannya untuk menjamin perlindungan tingkat tinggi dari paspor-paspor dan dokumen-dokumen perjalanan terhadap pemalsuan.
2. Para Pihak wajib memeriksa paspor-paspor dan dokumen-dokumen perjalanan guna mematuhi standar minimum keamanan untuk mesin pembaca dokumen perjalanan yang direkomendasikan oleh ICAO.

Pasal 8

Persetujuan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari Para Pihak yang muncul dari Konvensi-konvensi Internasional dan Persetujuan-Persetujuan dimana salah satu atau keduanya adalah Pihak.

Pasal 9

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

Pasal 10

1. Persetujuan ini dapat diubah, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 11.
2. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan umum.

3. Pemberlakuan maupun pengakhiran ketentuan-ketentuan sebagaimana dirujuk pada Paragraf 1 dan 2 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 11

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam prosedur internalnya, telah terpenuhi.
2. Persetujuan ini wajib mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yg sama.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang disepakati.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu sepuluh, rangkap dua asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran pada Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



R.M. Mulya M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
PERSATUAN EMIRAT ARAB**



Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

اتفاقية

بين حكومة جمهورية اندونيسيا وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

إن حكومة جمهورية اندونيسيا ، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليهما فيما بعد "الطرفين"،
رغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون القائم بينهما،
وتأكيدا على استعدادهما للعمل على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية،
الخاصة، والخدمة، من مواطني البلدين، من تأشيرة الدخول إلى أراضي الطرف الآخر،
وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلديهما،
ومراعاة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات
القنصلية للعام 1963م.
اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى

- 1- يتم إعفاء مواطني جمهورية اندونيسيا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمة سارية، من الحصول على تأشيرة دخول، عبور أو إقامة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة لا تتجاوز 60 (ستون) يوما من تاريخ دخولهم إلى البلاد.
- 2- يتم إعفاء مواطني دولة الامارات العربية المتحدة الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خاصة سارية، من الحصول على تأشيرة دخول، عبور أو إقامة على أراضي جمهورية اندونيسيا، لمدة لا تتجاوز 60 (ستون) يوما من تاريخ دخولهم إلى البلاد.

3- يجب ألا تقل مدة سريان جوازات السفر الدبلوماسية، الخدمة، والخاصة لمواطني الطرفين عن ستة أشهر، على أقل تقدير، من تاريخ الدخول إلى أراضي الطرف الآخر.

المادة الثانية

يتعين على مواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، خدمة وخاصة، المعيّنين كأعضاء في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الطرف الآخر، وأفراد عائلاتهم المصاحبين لهم، الحصول على التأشيرة ذات الصلة من سفارة الطرف الآخر.

المادة الثالثة

1- يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة والخدمة سارية المفعول، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، كما يجب على كل طرف موافاة الطرف الآخر بنماذج عن أي جوازات سفر جديدة يتم استحداثها، وذلك قبل 30 (ثلاثون) يوما قبل موعد بدء العمل بها.

2- يتولى الطرفان إخطار كل منهما الآخر عند إجراء أي تعديل على القوانين والأنظمة الوطنية، الخاصة بكل منهما، ذات الصلة بإصدار جوازات السفر.

المادة الرابعة

لا يُسمح لرعايا أي من الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة للعمل، أو ممارسة أية مهنة، أو الانخراط في الدراسة بدون مراعاة القوانين المطبقة في كلا البلدين، ذات الصلة بهذه الأنشطة.

المادة الخامسة

1- يجوز لمواطني أي من الطرفين، المشار إليهم في هذه الاتفاقية، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، خدمة، وخاصة سارية، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر والخروج منها، عبر أي من المنافذ الحدودية المخصصة للممرور الدولي للمسافرين من قبل سلطات الهجرة المعنية، وذلك دون أي

قيود، ماعدا تلك المنصوص عليها في أحكام الأمن، الهجرة، الجمارك، الصحية، وأية أحكام أخرى للدخول، والتي قد تكون قابلة للتطبيق على حاملي مثل تلك الجوازات السارية.

2- هذه الاتفاقية لا تعفي مواطني كلا الطرفين من الالتزام باحترام القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الآخر، والخاصة بدخول، إقامة ومغادرة الأجانب.

المادة السادسة

1- يحتفظ كلا الطرفين بالحق في رفض قبول، أو تقليص فترة إقامة أي من الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، أو من قد يعرض السلام العام، النظام العام، الصحة العامة، الأمن الوطني للخطر.

2- في حال فقد أحد مواطني أي من الطرفين جواز سفره/ سفرها الساري، المذكور في المادة 1 من هذه الاتفاقية، على أراضي الطرف الآخر، يجب عليه/ عليها للتوجه لإخطار الجهات المختصة لدى ذلك الطرف المستقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وعلى البعثة الدبلوماسية، أو البعثة القنصلية المعنية، إصدار جواز سفر جديد له أو وثيقة سفر، على أن تقوم البعثة التي أصدرت الجواز أو وثيقة السفر بإعلام الجهات المختصة للدولة المستقبلة بذلك.

المادة السابعة

1- يبدي الطرفان استعدادهما للعمل على ضمان أعلى مستويات الحماية لجوازات ووثائق السفر ضد التزوير.

2- علي الطرفين مراجعة جوازات ووثائق السفر الخاصة بكل منهما، بغرض الامتثال للحد الأدنى من المعايير الأمنية في جوازات ووثائق السفر المقروءة آلياً، طبقاً لما أوصت به منظمة الطيران المدني الدولية.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي يكون الطرفان، أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

يتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة العاشرة

- 1- عند الضرورة يجوز تعديل هذه الاتفاقية، بالاتفاق المتبادل الخطي بين الطرفين. يدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11.
- 2- يمكن لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية، كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، النظام العام أو الصحة العامة.
- 3- ويجب إشعار الطرف الآخر فوراً بالدخول في، أو إنهاء التدابير المشار إليها في الفقرات 1 و 2 من هذه المادة، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الحادية عشر

- 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار الأخير من قبل الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وفقاً للأنظمة الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.
- 2- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة 5 (خمس) سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة.
- 3- يجوز لأي من الطرفين أن يقوم بإنهاء هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق توجيه إشعار خطي للطرف الآخر يفيد باعتزاه إنهاءها، عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك قبل 30 (ثلاثون) يوماً من التاريخ المحدد لإنهاءها.

إشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على اتفاقية هذه.

تمت في في جاكرتا الموافق 19 أكتوبر من عام 2010م، من نسختين أصليتين
باللغات العربية والاندونيسية والإنجليزية ، جميع النصوص متساوية الحجية، وفي
حالة الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة

دولة الإمارات العربية المتحدة



عبد الله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية

عن حكومة

جمهورية اندونيسيا



ر.م. مارتي م. تاتاليفاوا

وزير الخارجية



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

ON

VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND
SPECIAL PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia of and the Government the United Arab Emirates, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to promote further development of bilateral relations and cooperation between the two countries,

Expressing their readiness to exempt nationals of the two countries holding diplomatic, service and special passports from entry visa to enter each other's territory,

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries,

Taking into account the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963,

Have agreed as follows:

Article 1

1. Indonesian nationals, who are holders of valid diplomatic and service passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the

territory of the United Arab Emirates for a period which does not exceed 60 (sixty) days from the date of entry.

2. The United Arab Emirates nationals, who are holders of valid diplomatic and special passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit or stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 60 (sixty) days from the date of entry.
3. The duration of diplomatic, service and special passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the other Party.

Article 2

Nationals of either Party who are holders of diplomatic, service and special passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party.

Article 3

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of the diplomatic, service and special passports used by either Party within a month after signing of this Agreement and either Party shall provide to the other Party the specimens of any new passport within 30 (thirty) days before issuance is being started.
2. The two Parties shall duly inform each other about any modification introduced in their respective national laws and regulations related to passports issuance.

Article 4

Nationals of either Party holding diplomatic, service and special passport, are not permitted to work or engaged in any profession or to study in each other's country without observing the rules and regulations applicable in both countries pertaining those activities.

Article 5

1. The holders of valid diplomatic, service and special passports of either Party referred to in this Agreement may enter into and depart from the territory of the other Party at any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary entry and other provisions which may be legally applicable to holders of such valid passports.
2. This Agreement does not exempt citizens of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party concerning the entry, stay and exit of foreigners.

Article 6

1. Both Parties reserve the rights to refuse admission to or shorten the stay of persona non grata or likely to endanger the public peace, public order, public health or national security.
2. If a national of either party losses his/her valid passport referred to in Article 1 of this Agreement in the territory of either Party, he/she shall inform the authorities concerned of the receiving Party. The diplomatic mission or consulate concerned shall issue a new passport or travel document to the aforementioned national and inform the competent authorities of the receiving Party.

Article 7

1. The Parties express their readiness to guarantee the highest level of protection of passports and travel documents against forgery.
2. The Parties shall review their passports and travel documents to comply with the minimum security standards for machine-readable travel documents recommended by ICAO.

Article 8

This Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties arising from international conventions and agreements to which either or both of them are Parties.

Article 9

Any differences or disputes arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties through diplomatic channels.

Article 10

1. This Agreement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the Parties. The amendment shall enter into force in accordance to the procedure set forth in Article 11.
2. Either Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, for reasons of national security, public order or public health.
3. The introduction as well as the termination of the measures referred to in Paragraph 1 and 2 of this Article shall immediately be notified to the other Party through diplomatic channels.

Article 11

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties have informed each other, through diplomatic channels, that all requirements for entry into force of this Agreement, as stipulated by their internal procedures, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and shall be renewed automatically for the same period.
3. Each Party may terminate this Agreement by giving to the other Party written notice of termination, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to the intended date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.

DONE in Jakarta on this nineteenth day of October in the year two thousand and ten, in two originals, each in Indonesian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**


R.M. Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED ARAB EMIRATES**


Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
Minister of Foreign Affairs